

BAB II

DISKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. DESKRIPSI KABUPATEN BANTUL

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul memang tidak bisa dilepaskan dari Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah perjuangan Indonesia pada umumnya. Awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermakas di Selarong sajak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menengani Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerinthan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontakan, dan pembentukan wilayah admistratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah adminstratif baru dalam kasultanaan disertai penetapan jabatan kepala yaitu: Bantulkarang untuk kawasan selatan, Danggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindak lanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20

juli 1831 secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal dengan nama Bantulkarang. Seseorang Nayaka Kasultanan kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengku Buwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepalawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat perang Diponegoro dikorban tanggal 20 juli 1825. Pada masa pendudukan jepang berdasarkan pada Usaha Seirei nomer 13 sedangkan *standsgemente ordenantie* dihapus. Kabupaten memiliki hak meneglola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintah ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkan hingga dikeluarkannya UU pokok pemerintahan daerah No 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomer 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan pemerintahan daerah otonom di seluruh Indonesia.

2. Slogan Kabupaten Bantul

Slogan Kabupaten Bantul adalah PROJOTAMANSARI yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Produktif-profesional

Artinya bahwa semua potensi yang ada di Kabupaten Bantul baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya bisa berproduksi sehingga mampu membantu mengembangkan potensi daerah, sedangkan profesionalnya lebih ditekankan kepada setiap warganya untuk benar-benar ahli dan matang dalam setiap bidang yang mereka kerjakan, tolak ukur dari profesionalisme ini dapat dilihat dari pelaksanaan pemerintah, pembangunan daerah, baik sarana maupun prasarananya.

b. Ijo royo-royo

Artinya tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang, perlu diingatkan kepada masyarakat bantul bahwa bagaimanapun bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

c. Tertib

Artinya bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum / perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

d. Aman

Artinya bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

e. Sehat

Artinya bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat /manusia yang menghuninya.

f. Asri

Artinya bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi

3. Logo Kabupaten Bantul



Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bantul:01//1972 Tentang lambang daerah Kabupaten Bantul:

a. Bentuk dan isi lambang

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah elipse yang merupakan gabungan antara teratai berkelopak lima. Bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL” di dalam bentuk elips yang merupakan bunga teratai berkelopak lima berisi tulisan yang menggambarkan:

- 1) Keadaan alam dan kekayaan alam
- 2) Latar belakang sejarah
- 3) Semangat dan cita-cita
- 4) Persatuan dan kesatuan

5) Ukuran lambang garis horisontal 30 dan garis vertikal 40

b. Arti dan makna lambang

- 1) Landasan idil pancasila.
- 2) Gambar bintang emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Gambar pohon kelapa menggambarkan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap.
- 4) Lukisan dalam warna merah, dan warna putih dari roda bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia.
- 5) Lukisan dalam gambar sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 6) Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 7) Lukisan struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar ukiran persegi empar dan keris berlekuk lima.
- 8) Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf jawa yang berbunyi “Hamamayu Hayuning

Bawono”. Nilai-nilai keagamaan dilukiskan dalam gambar bintang emas bersegi lima.

9) Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar keris dan gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di gua Selarong pada waktu melawan penjajahan Belanda. Semangat pembangunan dilukiskan dalam gambar roda bergerogi dan mencapai kemakmuran perlu dibangun perindustrian.

10) Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkaian kapas dengan lima belas biji dan daunnya serta padi dengan lima puluh butir biji menunjukkan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomer 15/1950. Keadaan alam dilukiskan dalam warna hijau muda, gambar pegunungan, sungai dan laut. Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi elips yang merupakan bunga teratai berkelopak lima dengan tiada terputus. Pemerintah dalam melaksanakan pengabdianya kepada masyarakat mempunyai tiga bidang yaitu:

(1) Bidang Legislatif

(2) Bidang Esekutif

(3) Bidang Yudikatif

11) Dilukiskan dalam gambar pohon kelapa dengan tiga pelepah dengan “Empat” butir buah kelapa melambangkan bahwa pemerintah mengikutsertakan masyarakat melalui: *social control*, *social sport*, *social participation*, dan *social resprocibility*.

12) Hasil produksi Daerah Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar Roda Bergerigi yang menunjukkan adanya pabrik, daun tembakau merupakan bahan eksport dan pohon kelapa yang berbuah menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (Geplak) dari Buah Kelapa.

4. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi

Visi Kabupaten Bantul adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu: "Bantul PROJOTAMANSARI sejahtera, demokratis, dan agamis."

b. Misi

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan yang berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.
- 4) Peningkatan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan ruang dan pelestarian lingkungan.

5. Letak Geografis

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y). Selain Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul mempunyai luas wilayah 506,85 km². Wilayah ini merupakan 15,9% dari luas keseluruhan Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Bantul berada disebelah selatan Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan :

Sebelah selatan: samudra indonesia

Sebelah utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Gunung Kidul

Sebelah barat : Kabupaten Kulon Progo

6. Kondisi Administratif

Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, dan 933 Padukuhan. Desa yang berada di Kabupaten Bantul dibagi berdasarkan status desa pedesaan dan perkotaan. Kecamatan Dlingo merupakan kecamatan paling luas yaitu 55,87 km² dan Kecamatan Srandakan adalah Kecamatan paling sempit yaitu 18,32 km², sedangkan jumlah pedesaan dan padukuhan terbanyak berada di Kecamatan Imogiri yaitu 8 desa dan 72 padukuhan, serta yang mempunyai jumlah pedesaan dan padukuhan terkecil adalah Kecamatan Srandakan yaitu 2 desa dan 43 padukuhan. Yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Desa, Dusun dan Luas kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km ²)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretak	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasihan	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	933	504,47

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

7. Kependudukan

Berdasarkan data proyeksi pada tahun 2010-2020, jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2016 mencapai 971.511 jiwa yang tersebar di 75 desa dan 17 kecamatan yang terdapa di Kabupaten Bantul. Dari data tersebut terdapat 481.510 laki-laki dan 490.001 perempuan, dengan luas wilayah 506,85 km² adalah 1.972 jiwa per km² dan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Banguntapan yaitu dengan jumlah 4.771 jiwa per km², sedangkan Kecamatan Dlingo memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 653 jiwa per km² (BPS Kab.Bantul). Data selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Peduduk
di Kabupaten Bantul TA 2016**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km²
1.	Srandakan	18,32	29.130	1.590
2.	Sanden	23,16	30.114	1.300
3.	Kretek	26,77	30.111	1.125
4.	Pundong	23,68	32.321	1.365
5.	Bambanglipuro	22,69	38.206	1.684
6.	Pandak	24,30	48.950	2.014
7.	Bantul	21,96	62.128	2.828
8.	Jetis	24,47	54.233	2.216
9.	Imogiri	54,49	58.082	1.006
10.	Dlingo	55,87	36.465	653
11.	Pleret	22,97	46.058	2.005
12.	Piyungan	32,54	53.422	1.645
13.	Banguntapan	28,48	135.888	4.771
14.	Sewon	27,16	112.323	4.142
15.	Kasih	32,38	122.323	3.778
16.	Pajangan	33,25	35.053	1.054
17.	Sedayu	34,36	46.523	1.354
	Jumlah	506,85	971.511	1.917

Sumber :BPS Kabupaten Bantul TA 2016

B. Deskripsi Program *One Village One Product* (OVOP)

Istilah OVOP (*one village one product*) sebuah konsep yang memprogramkan suatu daerah untuk menciptakan sebuah prodak yang memiliki keunikan tersendiri, yang bisa dikembangkan menjadi peluang besar usaha yang memberikan pendapatan cukup besar untuk masyarakatnya, prodak yang diciptakna harus memiliki nilai jual dipasaran baik lokal, regional dan internasional.

Pada prinsipnya OVOP ini merupakan gerakan masyarakat yang secara integral diupayakan untuk pengembangan potensi ataupun kekayaan daerah, peningkatan pendapatan daerah, sekaligus memberi rasa percaya diri dan kebanggan untuk masyarakat terhadap kemampuan yang dimiliki di daerah. Selain hal itu juga untuk pengembangan sumber daya maupun produk lokal yang khas ataupun budaya lokal yang secara turun temurun dapat digali dan dikembangkan sehingga menghasilkan prodak bernilai tambah yaang tinggi sesuai permintaan pasar. Dengan adanya pembagian peran yang jelas dari pemangku kekuasaan, perencanaan yang baik , tahapan kegiatan, dan komitmen bersama dapat memperkuat IKM.

Program OVOP di Kabupaten Bantul diartikan dalam bentuk program Pengembangan Prodak Andalan Setempat (PAS), munculnya program ini karena sebagai salah satu usaha BAPPEDA Kabupaten Bantul dalam membantu menurunkan jumlah angka kemiskinan, melalui program

ini akan dibentuk kelompok usaha sesuai dengan potensi daerahnya, dengan beberapa inovasi yang tertera pada konsep tujuan utama sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan dari pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP/PAS di Kabupaten Bantul yaitu :

- a. Intervensi sebagai “*guidance*” tahapan,
- b. Sebagai sarana penyusunan intervensi,
- c. Sebagai sarana dan prasarana penyusunan rencana monitoring dan evaluasi keberhasilan program,
- d. Sebagai sarana untuk mengembangkan potensi setempat guna mengurangi kemiskinan.

2. Tahapan Pelaksanaan OVOP

Tahapan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bantul terkait program OVOP dalam rangka mencapai tujuan utamanya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan *workshet* verifikasi dan evaluasi

Penyiapan *workshet* verifikasi dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi

Kabupaten Bantul setelah menerima proposal pengajuan OVOP yang disampaikan oleh BAPPEDA Kabupaten Bantul yang kemudian dibuatkannya indikator format pilihan untuk menjadi bahan penentu kelompok akan dijadikan sasaran binaan OVOP.

Penentuan indikator ini menjadi penting untuk penentuan intervensi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terhadap kelompok usaha tersebut. Indikator tersebut berupa formulir analisa kegiatan Pengembangan Andalan Setempat (PAS) dimana didalamnya tertera nama kelompok, jenis usaha, jumlah anggota, dusun, desa(tertinggal/tidak tertinggal), kecamatan selain itu juga ada variabel penilaian sasaran kelompok, indikator kegiatan, input, proses, output, outcomes, cost, dan benefit.

b. Kajian proposal

Kecamatan yang berada di kabupaten Bantul sebelum mengajukan proposal OVOP kepada BAPPEDA hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan infetarisasi terhadap potensi lokal yang terdapat di masing-masing kecamatan baik berupa kerajinan, industri, dan jenis potensi lokal lainnya yang

merupakan produk andalan setempat karena dari hasil tersebut maka barulah bisa dibuatkan proposal untuk pengembangan produk dan pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari kemitraan, SDM, saran dan prasarana.

Proposal yang dibuat kemudian disampaikan kepada BAPPEDA Kabupaten Bantul yang kemudian di verifikasi internal melalui wawancara langsung untuk menentukan layak atau tidaknya proposal tersebut, kemudian hasil verifikasi tersebut diterima oleh Dinas PERINDAGKOP untuk di tindak lanjuti dengan membuat instrument verifikasi lapangan.

c. Verifikasi lapangan

Verifikasi lapangan dilakukan secara langsung untuk melihat apakah usaha tersebut ada dan berjalan, serta usaha yang diusulkan atau diajukan sesuai atau tidak dengan berbekalkan beberapa indikator. Dari hasil verifikasi lapangan tersebut kemudian Kepala Dinas mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mencantumkan sasaran, tujuan, target dan sasaran terhadap kelompok OVOP/PAS.

d. Penilaian kelayakan kelompok sasaran

Penilaian kelayakan kelompok sasaran penting karena untuk mendapatkan intervensi yang dimaksudkan guna mendapatkan pelayanan prima dan sarana prasarana yang adil bagi kelompok- kelompok yang sama-sama mengajukan proposal.

e. Penetapan lokasi

Penetapan lokasi ini setelah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Dinas Perindustri, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul yang sudah ditentukan lokasi OVOP/PAS yang menjadi sasaran pembinaan dari kegiatan tersebut.

f. Intervensi kegiatan

Dari surat keputusan (SK) sudah ditetapkan oleh kepala dinas selanjutnya akan mendapat nama kelompok PAS, yang dilanjutkan dengan aksi dari kelompok mulai dari perencanaan program, dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok PAS kemudian disusunlah RKA, DPA, dari program dan kegiatan yang dimasukkan kedalam KUA-PPAS, dan setelah pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut dilakukanlah monev untuk menilai program tersebut berhasil atau tidak.

g. Intervensi PAS

Dari hasil verifikasi dilakukan dilapangan diperoleh gambaran kelompok itu berada pada suatu kondisi berada dilevel apa untuk dilakukan intevensi PAS yang urutan *bussines* yang merupakan rangkaian pembinaan usaha sebgai berikut:

1) Memulai bisnis

Pada tahap ini dilakukannya pelatihan, pemberian peralatan, fasilitas promosi, perijinan, pembuatan kemasan untuk kelompok sasaran PAS/OVOP yang sudah memilik embrio kelompok usaha untuk dikembangkan.

2) AMT

Intevensi dari AMT berupa pemberian motivasi pada kelompok sasaran PAS, agar dapat dikembangkan sesuai dengan harapan, bukti AMT berhasil ditandai dengan semakin meningkatnya hasil produksi baik dari sisi kualitas dan kuantitas, serta omset penjualan meningkat.

3) Kelembagaan

Pada tahap ini sisi kelembagaan dilakukan untuk penguatan sumber daya manusia pengelolanya, administrasi pengolahan keuangan, hubungan antar lembaga, perizinan surat-surat yang mendukung oprasional kelompok PAS.

4) Pelatihan Teknis dan Produksi

Pada tahap ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakuakn memberi pelatihan terkait perbaikan sisi kualitas, dan kwatitas produksi yang terdiri dari perbaikan mutu produksi, spiritnya, peralatan tepat gunanya, efesiensinya, tenaga kerjanya, perbaikan mutu *design*, dan kemasannya.

5) Manajemen pemasaran

Intevensi pada sisi manajemen pemasaran ini adalah kegiatan untuk meningkatkan omset penjualan agar dapat dipasarkan dalam negri dan luar negri, target pasar (sekmen pasar), SNI, HKI, EXPORT dan IMPORT.

6) Pelatihan manajemen dan *CAFE*

Intervensi dari kegiatan ini terkait kegiatan manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan.

7) Network

Intervensi ini dilakukan untuk menjalin jaringan pemasaran kaitanya peningkatan omset penjualan, peningkatan jaringan melalui penawaran manual dan elektronik, pameran, dan melalui tamu bisnis/kemitraan.

h. Monitoring dan evaluasi

Pada tahap ini adalah tahap terakhir setelah semua tahap dilakukan kemudian dilakukannya MONEV untuk melihat tingkat keberhasilan yang sudah tercapai serta perbaikan dari setiap tahap jika dalam pelaksanaannya masih kurang.